

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR : 61/PMK.01/2012
TENTANG : PERSYARATAN UNTUK MENJADI
KUASA HUKUM PADA
PENGADILAN PAJAK

**FORMULIR
PERMOHONAN BARU**

Kepada:
Yth. Ketua Pengadilan Pajak
Di Jakarta

Perihal : **PERMOHONAN IZIN MENJADI KUASA HUKUM PADA PENGADILAN PAJAK**

Dengan hormat,
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :(1).....
Tempat / tanggal lahir :(2).....
Pendidikan Terakhir :(3).....
Alamat Rumah :(4).....
Nomor Telepon/HP :(5).....
No. Kartu Tanda Penduduk :(6).....
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :(7).....

Dengan ini mengajukan permohonan izin menjadi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak. Untuk melengkapi permohonan tersebut, bersama ini saya lampirkan dokumen sebagai berikut:

1. Daftar Riwayat Hidup/pengalaman kerja dan riwayat pendidikan;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) WNI yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang;
3. Fotokopi NPWP yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang;
4. Fotokopi ijazah Sarjana atau Diploma IV dari perguruan tinggi yang terakreditasi dan telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang;
5. Fotokopi tanda bukti pengetahuan yang luas dan keahlian tentang peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, yang telah dilegalisir oleh instansi berwenang, diantaranya:
 - a. Fotokopi ijazah/sertifikat brevet pajak atau keahlian di bidang Kepabeanan/Cukai dari instansi/lembaga yang terakreditasi;
 - b. Fotokopi ijazah Sarjana di Bidang Administrasi Fiskal atau Diploma III (tiga) Pajak/Kepabeanan dan Cukai dari Perguruan Tinggi yang terakreditasi dalam menyelenggarakan pendidikan; atau
 - c. Fotokopi surat Izin Konsultan Pajak yang masih berlaku untuk yang berprofesi sebagai Konsultan Pajak.
6. Pas photo terakhir pemohon berukuran 2x3 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
7. Asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI); dan
8. Asli Surat pernyataan yang berisi komitmen untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan cara sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya.

Demikian disampaikan agar maklum.

.....(8).....,.....(9).....

Pemohon

(10)

(.....(11).....)

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR PERMOHONAN

- Nomor (1) : Diisi nama orang perseorangan yang mengajukan permohonan
Nomor (2) : Diisi tempat dan tanggal lahir orang perseorangan yang mengajukan permohonan
Nomor (3) : Diisi pendidikan terakhir orang perseorangan yang mengajukan permohonan
Nomor (4) : Diisi alamat tempat tinggal orang perseorangan yang mengajukan permohonan
Nomor (5) : Diisi nomor telepon orang perseorangan yang mengajukan permohonan
Nomor (6) : Diisi nomor Kartu Tanda Penduduk orang perseorangan yang mengajukan permohonan
Nomor (7) : Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak orang perseorangan yang mengajukan permohonan
Nomor (8) : Diisi nama kota tempat formulir permohonan dibuat
Nomor (9) : Diisi tanggal formulir permohonan dibuat
Nomor (10) : Diisi tanda tangan orang perseorangan yang mengajukan permohonan
Nomor (11) : Diisi nama orang perseorangan yang mengajukan permohonan
-

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM
u.b.
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

MENTERI KEUANGAN,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

GIARTO
NIP 195904201984021001

**FORMULIR
DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama Lengkap :(1).....
Tempat/tanggal lahir :(2).....
Alamat Rumah :(3).....
.....
Nomor Kartu Tanda Penduduk WNI :(4).....
Pendidikan Formal : 1.(5).....
(Cantumkan Tahun Lulus 2.
dan Nama Pendidikannya) 3.
4.
5.
6.
Nomor Izin Konsultan Pajak :(6).....
.....
Pendidikan Brevet/PPJK :(7).....
(Cantumkan jenis Brevet/
Sertifikat, nomor, bulan dan tahun,
serta Lembaga yang menerbitkan
brevet/sertifikat
Pekerjaan :(8).....
.....
Pengalaman Kerja :(9).....
.....
.....

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan akan saya pertanggungjawabkan sebagaimana mestinya.

.....(10).....,.....(11).....

(12)

(.....(13).....)

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR DAFTAR RIWAYAT HIDUP

- Nomor (1) : Diisi nama orang perseorangan yang mengajukan permohonan
Nomor (2) : Diisi tempat dan tanggal lahir orang perseorangan yang mengajukan permohonan
Nomor (3) : Diisi alamat tempat tinggal orang perseorangan yang mengajukan permohonan
Nomor (4) : Diisi nomor Kartu Tanda Penduduk orang perseorangan yang mengajukan permohonan
Nomor (5) : Diisi riwayat pendidikan formal orang perseorangan yang mengajukan permohonan dengan menyebutkan tahun lulus dan nama pendidikannya
Nomor (6) : Diisi nomor izin konsultan pajak
Nomor (7) : Diisi jenis Brevet/Sertifikat, nomor sertifikat, bulan dan tahun terbit sertifikat, serta lembaga yang menerbitkan brevet/ sertifikat
Nomor (8) : Diisi pekerjaan terakhir orang perseorangan yang mengajukan permohonan
Nomor (9) : Diisi riwayat pengalaman kerja orang perseorangan yang mengajukan permohonan
Nomor (10) : Diisi nama kota tempat formulir Daftar Riwayat Hidup dibuat
Nomor (11) : Diisi tanggal Daftar Riwayat Hidup dibuat
Nomor (12) : Diisi tanda tangan orang perseorangan yang mengajukan permohonan
Nomor (13) : Diisi nama orang perseorangan yang mengajukan permohonan
-

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM
u.b.
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

MENTERI KEUANGAN,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

GIARTO
NIP 195904201984021001

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR : 61/PMK.01/2012
TENTANG : PERSYARATAN UNTUK MENJADI
KUASA HUKUM PADA
PENGADILAN PAJAK

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, sebagai Kuasa Hukum di Pengadilan Pajak dengan ini menyatakan untuk berkomitmen bahwa saya:

1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi dan Kolusi;
2. Dalam menjalankan tugas sebagai Kuasa Hukum, berjanji akan melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan cara sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya;
3. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam komitmen Kuasa Hukum ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan komitmen Kuasa Hukum ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan akan saya pertanggungjawabkan sebagaimana mestinya.

.....(1).....,.....(2).....
(3) 
(.....(4).....)

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN

- Nomor (1) : Diisi nama kota tempat surat pernyataan dibuat
Nomor (2) : Diisi tanggal surat pernyataan dibuat
Nomor (3) : Diisi tanda tangan orang perseorangan yang mengajukan permohonan
Nomor (4) : Diisi nama orang perseorangan yang mengajukan permohonan
-

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM
u.b.
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

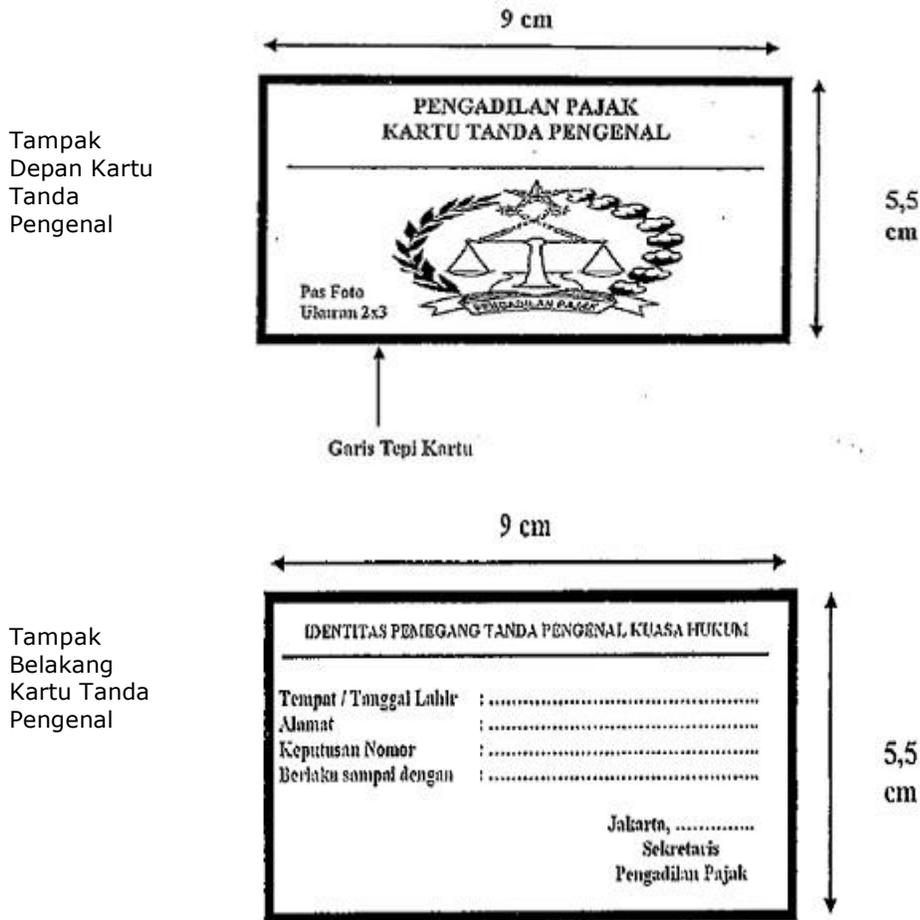
MENTERI KEUANGAN,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

GIARTO
NIP 195904201984021001

LAMPIRAN IV
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
 INDONESIA
 NOMOR : 61/PMK.01/2012
 TENTANG : PERSYARATAN UNTUK MENJADI
 KUASA HUKUM PADA
 PENGADILAN PAJAK



Keterangan Gambar Kartu Tanda Pengenal (Kartu):

- Pas photo : Ukuran 2 X 3 cm (hitam putih atau berwarna).
- Warna tulisan pada kartu : warna hitam.
- Alamat : Sesuai dengan alamat yang tercantum di KTP pemohon.
- Keputusan Nomor : Diisi sesuai dengan nomor Keputusan Ketua Pengadilan Pajak tentang Izin Kuasa Hukum yang berlaku.
- Berlaku sampai dengan : Diisi sesuai dengan jangka waktu masa berlaku Keputusan Ketua Pengadilan Pajak tentang Izin Kuasa Hukum yang masih berlaku.
- Ukuran kartu : Panjang 9 (sembilan) cm x lebar 5,5 (lima koma lima) cm
- Logo/lambang : Logo/lambang Pengadilan Pajak hanya tergambar ditengah permukaan Kartu Tanda Pengenal (tidak tergambar pada belakang Kartu Tanda Pengenal)

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BIRO UMUM
 u.b.
 KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

MENTERI KEUANGAN,
 ttd.
 AGUS D.W. MARTOWARDOJO

GIARTO
 NIP 195904201984021001

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR : 61/PMK.01/2012
TENTANG : PERSYARATAN UNTUK MENJADI
KUASA HUKUM PADA
PENGADILAN PAJAK

**FORMULIR
PERMOHONAN PERPANJANGAN**

Kepada:
Yth. Ketua Pengadilan Pajak
Di Jakarta

Perihal : **PERMOHONAN PERPANJANGAN IZIN MENJADI KUASA HUKUM PADA PENGADILAN PAJAK**

Dengan hormat,
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :(1).....
Tempat / tanggal lahir :(2).....
Pendidikan Terakhir :(3).....
Alamat Rumah :(4).....
Nomor Telepon/HP :(5).....
No. Kartu Tanda Penduduk :(6).....
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :(7).....

Dengan ini mengajukan permohonan perpanjangan izin menjadi kuasa hukum pada Pengadilan Pajak. Untuk melengkapi permohonan tersebut, bersama ini saya lampirkan dokumen sebagai berikut:

1. Daftar Riwayat Hidup;
2. Fotokopi Keputusan Ketua Pengadilan Pajak tentang Izin Kuasa Hukum yang masih berlaku;
3. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal kuasa hukum yang terakhir;
4. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) WNI yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang;
5. Fotocopi NPWP yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang; dan
6. Pas photo terakhir pemohon berukuran 2 x 3 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
7. Asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI).

Demikian disampaikan agar maklum.

.....(8).....,.....(9).....

Pemohon

(10)

(.....(11).....)

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR PERMOHONAN PERPANJANGAN

- Nomor (1) : Diisi nama orang perseorangan yang mengajukan permohonan perpanjangan
Nomor (2) : Diisi tempat dan tanggal lahir orang perseorangan yang mengajukan permohonan perpanjangan
Nomor (3) : Diisi pendidikan terakhir orang perseorangan yang mengajukan permohonan perpanjangan
Nomor (4) : Diisi alamat tempat tinggal orang perseorangan yang mengajukan permohonan perpanjangan
Nomor (5) : Diisi nomor telepon orang perseorangan yang mengajukan permohonan perpanjangan
Nomor (6) : Diisi nomor Kartu Tanda Penduduk orang perseorangan yang mengajukan permohonan perpanjangan
Nomor (7) : Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak orang perseorangan yang mengajukan permohonan perpanjangan
Nomor (8) : Diisi nama kota tempat formulir permohonan perpanjangan dibuat
Nomor (9) : Diisi tanggal formulir permohonan perpanjangan dibuat
Nomor (10) : Diisi tanda tangan orang perseorangan yang mengajukan permohonan perpanjangan
Nomor (11) : Diisi nama orang perseorangan yang mengajukan permohonan perpanjangan
-

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM
u.b.
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

MENTERI KEUANGAN,
ttd.
AGUS D.W. MARTOWARDOJO

GIARTO
NIP 195904201984021001